

MULTIKULTURALISME DI BIMA PADA ABAD X - XVII

Bambang Sulistyio

Jurusan Sejarah, Universitas Hasanuddin, Makassar

bambang5ulistyio@yahoo.com

ABSTRACT

The authors tend to argue that the history of Bima, in West Nusatenggara was started in early 17th century, when Bima development political relations with South Sulawesi. Hindu civilization in the form of worship in Wadu Paha, be overlooked, was regarded as a foreign culture. Historians tend to argue that Bima before Islam, have animism and dynamism belief. There are tendency rejects reality the Javanese role in history of Bima. This argument is not rational. What is the benefit of foreigner build a place of worship in one community who has different beliefs? This article would reconstruction history of Bima with appreciate the various components of culture that shaped his civilization. Elements of pre- Islamic became an important civilization component; not only animism and dynamism, but also Hindu . It is still apparent as the idealism of Bimanese in the present.

Keywords: multiculturalism, ethnic, Bima

ABSTRAK

Para penulis sejarah Bima berpendapat bahwa awal peradaban Bima dimulai pada abad 17, ketika Bima menjalin hubungan-hubungan politik dengan Sulawesi Selatan. Peradaban Hindu berupa kompleks peribadatan di Wa du Paha, cenderung diabaikan, dianggap sebagai kebudayaan asing. Para sejarawan cenderung berpendapat bahwa Bima sebelum Islam, memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada kecenderungan subyektivitas yang menolak peran Jawa dalam sejarah Bima. Namun apabila dicermati pendapat ini tidak rasional. Apa kepentingan orang Asing membangun tempat peribadatan di suatu komunitas yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Tulisan ini berupaya merekonstruksi kembali sejarah Bima dengan menempatkan dan menghargai berbagai komponen kebudayaan Bima yang telah membentuk peradabannya. Unsur-unsur pra Islam menjadi unsure penting peradaban tidak hanya animism dan dinamisme, tetapi juga Hindu. Hal ini masih nampak jelas sebagai idealism orang Bima di masa kini.

Kata kunci: multikulturalisme, etnis, Bima

PENDAHULUAN

Dalam studi sejarah dewasa ini berkembang penulisan subaltern yang merupakan salah satu bentuk post kolonialisme. Salah satu di antara mereka adalah Edward Said yang menulis Orientalism (1978). Ia mengkritisi pemahaman sejarah dunia dalam polarisasi/kategori kebudayaan Barat dan Timur yang kontradiktif. Barat digambarkan bersifat rasional, kuat dan maskulin, sedangkan Timur bersifat irrasional, lemah dan feminis. Hal ini dianggapnya

sebagai upaya legitimasi kekuasaan Barat atas negeri-negeri jajahan, yang membenarkan hegemoni dan subordinasi Barat. Edward Said berpendapat pandangan ini sangat picik (Gandhi, 2006: 220). Untuk kasus penulisan Sejarah Bima, sudah tentu bukan hendak menempatkan hegemoni Barat. Akan tetapi juga ada kepicikan pandangan dalam pemahaman kebudayaannya, terutama pada keberadaan kebudayaan Hindu-Jawa. Penulisan sejarah semestinya mengikuti jejak Edward Said, tidak sebatas pada bidang politik, melainkan

juga pada bidang kebudayaan yang menjiwai perilaku masyarakatnya. Misalnya pendapat Priyohutomo bahwa pada masyarakat Hindu kekuasaan raja tidak terbatas. Negara dan penduduknya adalah milik raja (Ismail, 2004). Pemahaman ini masih sebatas di permukaan, kiranya perlu penjelasan lebih lanjut sehingga tidak terkesan menimbulkan sikap antipati kepada suatu kultur, bahkan lebih dari itu mempelajari sejarah akan mendapat manfaat tidak hanya pada dimensi ilmu pengetahuan, tetapi juga kebudayaan. Perlu penghayatan nilai-nilai ideal para pelaku sejarah.

Rekonstruksi proses sejarah sosial-budaya Bima ini disusun dengan berdasarkan pendekatan teoritis tahapan perkembangan masyarakat Gerhard dan Jeans Lenski. Perkembangan sosial merupakan dampak penemuan teknologi. Fokus utama yang kami kembangkan adalah konsepsi masyarakat holtikultur dan negara agraris. Selanjutnya khusus mengenai perilaku budaya dipahami dalam perspektif Emile Durkheim, yakni agama (relegi) merupakan sumber nilai yang mengatur, mengendalikan perilaku manusia. Dengan agama berarti mengakui adanya kekuatan atau tangan-tangan yang tidak kelihatan yang mengatur kehidupan.

ETNIS DAN KEBUDAYAAN BIMA PADA JAMAN HINDU

Zollinger, seorang etnolog Belanda berpendapat bahwa orang Bima di Sumbawa adalah pendatang dari suku Melayu. Penduduk asli Sumbawa adalah suku Donggo, yang tinggal di pegunungan. Berdasarkan ciri kebudayaannya orang Bima berbeda dengan orang Makassar. Rumah-rumah orang Makassar dibangun di atas panggung yang tinggi; sedangkan orang

Bima hanya beberapa kaki di atas tanah; demikian juga tulisan Bima tidak sama dengan tulisan Makassar. Mereka memiliki perkampungan sendiri. Braam Morris, Gubernur *Celebes en Onderhoorighedent* (Makassar dan Daerah Taklukannya) berpendapat bahwa sifat orang Bima adalah penyabar dan patuh (Harris, Zuhdi, & Wulandari, 1997). Meskipun demikian tidak diketahui dari mana dan kapan sesungguhnya suku Bima mulai menempati pulau Sumbawa. Dialek bahasa yang dipergunakan juga berbeda. Orang Bima cenderung menghindari penggunaan vokal untuk bagian akhir kata, hal ini berbeda dengan Makassar.

Kitab Bo Sangaji memuat informasi sejarah Bima. Dari kitab ini dapat diketahui bahwa sampai abad 10 Bima belum merupakan kerajaan, masyarakatnya hidup bersuku-suku yakni ketika dikenal dengan negeri Mbojo. Namun Bo Sangaji tidak menjelaskannya dengan detail. Mungkin kategori sosiologis Gerhard dan Jeans Lenski (Bassis, 1991: 143) dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Menurutnya periode ini merupakan masa kehidupan holtikultur. Masyarakat bercocok tanam padi-padian dan memelihara ternak. Mereka sudah menetap, bukan masyarakat nomaden lagi. Penduduk desa terdiri dari 40 sampai 250 orang, merupakan satu unit produksi dan kehidupan.

Pemilikan wilayah merupakan tanah yang dikerjakan baik secara permanen, dan dibagian lain digarap semi permanen. Kehidupan desa ditandai dengan gotong royong dalam segala hal. Kehidupan politik berlangsung secara demokratis. Hubungan antar warga desa dalam ikatan kekerabatan atau *clan*. Hak individu atas tanah dijamin oleh hubungan kekuasaan kekerabatan. Pada masa itu telah terdapat perdagangan formal antar desa, yang dilakukan secara barter. Upacara-upacara adat di-

lakukan dengan pesta atau upacara-upacara ritual yang dimaksudkan sebagai pemberian dan memperkuat aliansi antar desa. Masing-masing desa punya pimpinan yang sifatnya sementara tergantung pada kemampuannya, biasanya sesuai usia. Pemimpin ini di Bima adalah Ncuhi yang seringkali juga memiliki kekuatan magis sebagai dukun. Mereka tidak memiliki institusi politik, ekonomi dan agama yang bersifat formal.

Menurut Gerhard dan Jeans Lenski masa ini bukan berarti jaman kehidupan sebagai layaknya di surga. Laki-laki mendapat status sebagai *warrior*. Senjata berupa tombak, panah, parang, pisau/keris/badik selalu dibawa oleh laki-laki sebagaimana pakaian untuk wanita. Posisi wanita berada dibawah kekuasaan laki-laki (sebagai inferior), menjadi sasaran pencurian dan perampokan. Wanita juga menjadi komoditas dagang. Pertentangan dan peperangan terjadi antar desa atau suku untuk memperebutkan wilayah dengan desa-desa tetangga atau menjaga solidaritas kekerabatan. Dalam proses ini kadang terjadi aliansi dan subordinasi antar desa atau suku. Perampokan dan perompakan menjadi bagian kehidupan. Dapat diperkirakan bahwa Bima merupakan suku yang kuat dan militan, dibandingkan dengan suku-suku lain di sekitarnya. Namun Di Bima memasuki menjelang kedatangan agama Hindu telah berkembang berbeda dengan kondisi sosial yang digambarkan Gerhard dan Jeans Lenski. Perempuan telah tampil sebagai sosok yang dihormati.

Kehadiran agama Hindu merupakan awal berdirinya kerajaan Bima pada kira-kira abad 10 yakni berdasarkan sumber tradisional *Bo Sangaji Kai* (catatan istana Bima) dan berbagai kronik tentang Bima yang menyatakan suku-suku Bima dipersatukan menjadi satu kerajaan, oleh seorang pendatang

dari Jawa yang bernama Sang Bima, yang kemudian bergelar Sangaji. Namun Bo Sangaji menjelaskan bahwa Sang Bima adalah putera Maharaja Pandu Dewanata, anak Maharaja Tunggal Pandita. Ibu Bima adalah Puteri Kunti. Saudara Tunggal Pandita yaitu Maharaja Indra Ratu, yang menurunkan raja-raja Luwu di Sulawesi Selatan. Akan tetapi Raja Bima pertama adalah Indra Zamrud, putra Sang Bima, yang dinobatkan oleh seluruh para Ncuhi (kepala-kepala suku), yakni Ncuhi Dorowani (di Bima Timur), Ncuhi Banggapupa (Bima Utara), Ncuhi Parewa (Bima Selatan) dan Ncuhi Bolo (Bima Barat) dengan melalui permusyawaratan. Dalam sumber itu dikisahkan bahwa Sang Bima meninggalkan pulau Jawa berlayar ke Timur, di pulau Sitonda ia berjumpa dengan seekor naga. Setelah melalui perkelahian naga dapat ditaklukan bahkan dijinakkan menjadi kekasihnya. Bima dengan kesaktiannya, yakni lewat pandangan mata, mampu menghamili naga, sehingga lahirlah seorang bayi perempuan yang dinamai Tasi Saring Naga. Sang Bima lalu mengawini Tasi Saring yang kemudian berputera Indra Jamrud dan Indra Komala, yang kelak menurunkan raja-raja Bima dan Dompu (Harris, Zuhdi, & Wulandari, 1997: 52).

Apabila dianalisis lebih dalam penjelasan dalam *Bo Sangaji Kai* kisah itu mungkin yang dimaksud Bima adalah Raja Ma Nggampo Jawa. Bo Sangaji ditulis dalam upaya melegitimasi otoritas kekuasaannya, dengan memerintahkan penulisan sejarah Bima. Pada periode Hindu-Budhis terdapat tradisi penulisan karya sastra sebagai pujian kepada raja. Hal ini lazim ditemukan pada periode Hindu di Jawa termasuk penciptaan suatu karya sastra tidak hanya berbagai Kronik atau Hikayat tentang Bima tetapi juga pada pakempakem wayang di Jawa. Misalnya Empu Kanwa menulis Arjunawiwaha sebagai

pujian kepada raja Erlangga. Mencipta karya sastra sebagai pemujaan kepada raja dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Seseorang dapat memerintah sebagai raja pada jaman Hindu adalah sesuatu yang istimewa. Dapat berkuasa sebagai raja hanya dimungkinkan bila menempati posisi sebagai titisan dewa. Oleh karena itu raja patut dipuji dan dihormati sebagai layaknya dewa. Sebaliknya merendahkan derajat raja sudah tentu akan diterima sebagai penghinaan bahkan dosa besar.

Berdasarkan kondisi budaya yang menjadi latar belakang penciptaan Kronik/Hikayat Bima maka isinya sudah tentu memiliki kebenaran. Meskipun sebagai pujian yang menempatkan para tokohnya memiliki kesaktian luar biasa sebagai dewa perlu diterima dengan sikap kritis. Kebenaran itu terletak pada adanya tokoh yang dipuji sebagai Bima, juga pada klaim-klaim wilayah yang dikuasainya. Dalam konteks ini maka Bima yang dimaksud sesungguhnya adalah Raja Ma Nggampo Jawa pendiri kerajaan Bima.

B i m a b u k a n l a h n a m a sesungguhnya, sebab Bima yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Barata Yudha (yang artinya perang antar keluarga Barata), yang merupakan bagian dari epos Hindu Mahabharata, melainkan pujian kepada Raja dan sosialisasi nilai sosial dan budaya kepada rakyatnya. Dalam epos dikisahkan sebagai perang antara pihak-pihak yang masih satu keluarga yakni antara yang benar (Pandawa) dan yang salah (Kaurawa). Bima adalah pihak yang benar yang terdiri dari lima bersaudara yakni Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, sedangkan pihak lawannya terdiri dari Duryudana bersaudara yang terdiri dari 100 orang. Perang akhirnya dimenangkan oleh keluarga Pandawa. Namun sebelum perang terdapat berbagai kisah, di antaranya Bima

mencari ilmu dan berguru kepada Begawan Durna. Bima hendak dibinasakan oleh gurunya yang sesungguhnya memihak Kaurawa, sehingga harus merantau, melakukan perjalanan jauh dan menyeberangi lautan, sehingga terlibat dalam berbagai pertempuran untuk mencari air penghidupan. Dalam perantauan ini ia bertemu dengan ular naga yang setelah dikalahkan akhirnya dikawininya. Dalam versi Wayang Jawa perkawinan ini melahirkan seorang anak yang bernama Antasena, namun menurut Hikayat Bima berputera Indra Jamrut. Namun menurut tradisi wayang Sunda Yudistira disebut dengan Darmawangsa. Jadi dengan mengintegrasikan kisah Bo Sangaji dan berbagai kronik/hikayat Bima dengan fakta sejarahnya dapat disimpulkan bahwa Bima sebagai pendiri kerajaan adalah seorang bangsawan Hindu Jawa, yakni adik Dharmawangsa.

Pada jamannya Dharmawangsa bergiat memperluas wilayah kekuasaannya. Hall, seorang sejarawan Barat berdasarkan catatan Cina bahwa duta dari Sriwijaya ketika pulang ke negerinya terpaksa kembali lagi ke Cina karena Laut Cina Selatan telah di kuasai Dharmawangsa. Jadi dapat diperkirakan bahwa pada jamannya Dharmawangsa juga menguasai Jawa Barat. Perlu dikemukakan bahwa dalam Mahabharata, Yudistira adalah sosok yang jujur yang disayangi para Dewa, sehingga jika berjalan dengan naik kereta, rodanya tidak menyentuh tanah. Berbeda dengan itu Bima meskipun sebagai adik Yudistira berperan sebagai pelindung saudara-saudaranya. Bima dalam dunia wayang selain sebagai sosok ideal yang tidak suka basa-basi, konsisten, keras dan berani, ia adalah orang yang gigih menuntut ilmu dalam rangka mencari jati dirinya dan berhasil menemukan Tuhannya. Dalam ekspansi kekuasaan itu bukan Dharmawangsa

(Yudistira) tetapi dilakukan oleh adik raja yang ditampilkan sebagai Bima.

Dengan pemahaman seperti itu maka dapat diterima pendapat Helius Sjamsuddin (1996: 9) bahwa Bima yang dimaksud dalam mitos Hikayat Bima adalah seorang aristokrat yang datang dari Jawa. Berdasarkan teks yang ditemukan di Leiden di kisahkan setelah Bima berlayar menaklukkan seluruh Jawa selanjutnya berlayar ke arah matahari hidup (timur). Dalam pelayaran singgah di pulau Sitonda, di lepas pantai Pekat (Tambora). Disini ia bertemu putri naga, selanjutnya ia berlayar ke arah matahari hidup (Manggarai dan Sumba). Ketika tokoh Sang Bima datang bersama rombongan di Dompo dan Mbojo telah ada unit-unit politik kecil atau komunitas sederhana yang dipimpin Ncuhi atau Dalu. Sang Bima kemudian kawin dengan putri setempat dan mempunyai keturunan yang selanjutnya diangkat raja yang disebut Sangaji (artinya sang raja). Setelah kembali lagi ke Sumbawa ia mewariskan daerah taklukannya kepada anaknya Idra Jamrud. Wilayah yang diwariskan Bima ini menjadi wilayah Bima bahkan pada jaman Islam.

Pada jaman Erlangga, raja kerajaan Medang di Jawa Timur (abad XI), Bima telah menjadi bagian dari mata rantai jalur perdagangan Jawa-Maluku. Pada masa ini banyak pedagang Jawa yang berlayar ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Mereka singgah di Bima membeli hasil hutan berupa kayu soga (bahan pewarna), sapang dan rotan, dan di Timor membeli kayu cendana. Pelabuhan Bima Lawa Due dan Nanga Belo, merupakan tempat pelabuhan transito, yakni untuk mengambil bahan makan dan air minum. Hubungan dengan Jawa terus berlangsung pada jaman Kediri; Jayakatwang, Raja Kediri dan Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit menggunakan kuda Bima untuk ber-

perang (Slametmulyana, 1965). Kitab Pararaton dan Negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1357 Senapati Nala menyerang dan menguasai Dompo (Harris, Zuhdi, & Wulandari, 1997). Kitab Negara Kertagama juga mencatat bahwa Taliwang, Dompo, Sape, Sanghyang Api, Bhima, Seran dan Utan Kandali, merupakan wilayah Majapahit. Sape, Sanghyang api, dan Bhima adalah wilayah kerajaan Bima.

Tokoh naga yang ditaklukan di pulau Sitonda, menarik untuk dianalisa. Perlu dikemukakan pertama bahwa Agama Hindu percaya pada reinkarnasi, yakni kehidupan kembali sesudah mati sesuai dengan dharma. Jika dharma seseorang buruk ia akan menjelma kembali dalam bentuk makhluk yang lebih rendah, misalnya hewan, sedangkan jika ia memiliki dharma yang baik akan menjadi makhluk yang lebih mulia misalnya dewa. Kedua dengan kepercayaan itu maka manusia dapat dicandra sesuai sifatnya, jika berkepribadian seperti sapi, maka akan digambarkan sebagai manusia berkepala sapi; dan lain-lain. Dengan pemahaman seperti ini maka naga dipulau Sitonda merupakan simbol seorang wanita penguasa yang perkasa, sebab naga adalah hewan yang oleh para dewa diberi senjata (bisa) untuk membunuh. Dalam dunia manusia maka wewenang membunuh/menghukum hanya dapat dilakukan oleh penguasa/raja, jika dilakukan oleh orang kebanyakan berarti kejahatan. Dalam pemahaman seperti ini kita dapat memahami mengapa naga digunakan sebagai simbol kerajaan di Cina, Buton, dan lain-lain. Dalam konteks seperti ini maka perang antara Bima dan naga bukanlah perang yang penuh dengan kekerasan, melainkan perkelahian yang menggemaskan karena berakhir dengan perkawinan, yang disimbolkan oleh po-

sisi kuku jempol, (tempat keberadaan kuku Bima) yang mengalahkan naga diapit oleh jari telunjuk dan jari tengah.

Dalam masyarakat Bima terdapat tiga amanah yang sering dijumpai hingga sekarang yakni sabar (*kalembo ade*); malu dan takut (*maja labo dahu*) dan apa yang dikatakan harus ada wujudnya (*nggahi rawi pahu*). Ke tiga amanah ini sulit dicari padanannya dalam ajaran Islam. Jadi pasti dikembangkan pada periode sebelumnya. Ketiga amanah ini sangat logis jika dikaitkan pada Hikayat Sang Bima. Ia sangat relevan dengan kondisi yang sangat mengharukan ketika Bima berpisah dengan anak dan isterinya. Bima harus pulang ke Jawa karena ia adalah tulang punggung raja Jawa (Dharmawangsa). Sementara itu para Ncuhi justru memintanya menjadi raja. Jadi ketiga amanah itu dapat diperkirakan sebagai nasehat Bima kepada isteri dan anak-anaknya. Sebagai isteri dan anak keluarga bangsawan tinggi Jawa pasti mereka ingin ikut tinggal ke ibu kota kerajaan di Jawa yang penuh dengan gemerlapan dan kemewahan; dan ironisnya Bima justru meminta anak-anaknya menggantikan posisinya sebagai raja dan tinggal di kampung halamannya. Bima yakin anak-anaknya dapat berkuasa sebagai raja terutama karena ada perlindungan penguasa setempat yang digelar sebagai ular naga dari pulau Sitonda. Perasaan haru, kecewa, bahkan frustrasi pasti terjadi dalam keluarga Bima. Dalam situasi seperti ini maka Bima menasehati anak-anaknya agar sabar, sebab kehadirannya sangat dibutuhkan rakyatnya. Siapa yang akan memimpin rakyat Bumi (bumi Mbojo) jika mereka tinggal di Jawa. Dalam kondisi frustrasi karena tidak dapat mengikuti ayahnya maka Bima pun mengingatkan kepada anak dan isterinya agar takut dan malu jika berbuat kesalahan karena mereka adalah raja. Bima justru mengajarkan kepada

Indra Jamrud kepandaian dan keterampilan sebagai pelaut dan nelayan; sedangkan Indra Kumala sebagai ahli pertanian. Bima pun berpesan kepada anak-anaknya sebagai raja yang arif dan bijaksana, bahwa semua yang dijanjikan harus dapat diwujudkan. Dengan tiga amanah ini sangat berkesan di kalangan rakyat Bima dan mengalami kemajuan pesat, oleh karena itu ketiga amanah itu dipegang teguh hingga kini.

Di Wadu Pa terdapat relief agama Hindu-Budhis dengan menampilkan Dewa Syiwa; Agama Hindu Syiwa yang biasanya dianut oleh suatu rezim yang membangun kekuasaan baru. Dapat diperkirakan bahwa relief Wadu Pa dibangun oleh Bima sebagai pendiri dinasti. Bima membangun dua tempat pemujaan untuk anak-anak dan rakyatnya. Pada salah satu sisi ia membangun relief pada dinding batu padas, yang didalamnya terdapat Lingga, Syiwa Mahadewa yang di kiri dan kanannya terdapat sejumlah dewa; dan selain itu terdapat meru (suatu atap berundak), dan patung Budha. Tempat pertama Wadu Pa I adalah tempat pemujaan kepada Syiwa sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Disini terdapat Syiwa Maha Dewa atau yang digambarkan sebagai lingga atau sang maha pencipta. Di sini penganut agama Hindu berdoa, mohon pengampunan dan mendekatkan dirinya kepada Syiwa Maha Dewa yang juga sebagai pencipta. Keberadaan Budha di dekat relief Syiwa Maha Dewa menunjukkan adanya kepercayaan pada prinsip bahwa hidup di dunia adalah *samsara* (sengsara), oleh karena itu tujuan hidup adalah membebaskan diri dari *samsara*. Dalam proses itu tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhannya (menjadi Budha). Tujuan ini dapat dicapai bila manusia meninggalkan segala kehidupan yang bersifat duniawi. Oleh karena itu Candi Borobudur di Jawa

Tengah yang didirikan pada abad 8, tersusun dalam tiga tingkatan. Tingkat terbawah adalah *kama datu* yang menyimbolkan kehidupan ketika manusia masih dikuasai oleh hawa nafsu dan kebutuhan jasmaninya, tingkat ke dua adalah *rupa datu* yakni ketika manusia telah bertemu dengan Tuhannya. Disini terdapat relief Lalitawistara yang menceritakan kelahiran Sidharta hingga menjadi Budha yang mendapat sinar ketuhanan. Pada kehidupan tertinggi, adalah *a rupa datu*, yakni gambaran kehidupan yang sempurna. Ketika manusia telah bersatu dengan tuhannya. Di sini, tidak ada lagi patung manusia, kecuali hanya stupa yang kosong. Manusia telah bebas ikatan-ikatan jasmaniah.

Pada tempat ke dua Wadu Pa II terdapat kompleks yang di dalamnya terdapat patung Ganesya dengan kaki menghadap patung Syiwa Mahaguru. Di dekat Ganesya (patung berkepala gajah terdapat meru dalam bentuk pohon dengan atap yang bertingkat-tingkat. Peribadatan disini bertujuan untuk mencari dan menuntut ilmu Pengetahuan. Ganesya adalah sosok yang hidup di dunia, yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Pohon dalam bentuk atap meru, yang bersusun melambangkan kehidupan yang bertingkat. Pada tingkatan terendah adalah tingkatan kehidupan dunia yang terendah, sebaliknya pada yang tertinggi adalah kehidupan yang ditandai dengan kesempurnaan pendekatan diri kepada Sang Hyang Mahakuasa (Syiwa Mahadewa atau yang dilambangkan sebagai Lingga). Setiap manusia berkewajiban menurut ilmu agar berhasil mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan dapat bersatu dengan tuhannya. Dalam konteks seperti ini maka tujuan hidup adalah mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa dengan berbekalkan ilmu pengetahuan.

Kebudayaan Hindu tampak pada penobatan Sang Bima, yang bersumpah berdasarkan adat kepada seluruh Ncuhi Dara bersama seluruh rakyat, Ia mengatakan: "*tobo mpa ra weki suna doum rimpa*" yang artinya hidup dalam kesederhanaan dan tenggangrasa (Ismail, 2004: 36). Hal ini berdasarkan ajaran Hindu-Budhis, yang disimbolkan dalam dunia pewayangan oleh kehidupan para ksatria Pandawa (yakni Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa) yang dijadikan suri teladan para penganut agama Hindu. Mereka berpakaian sederhana, bahkan Bima dan Arjuna tidak berbaju. Fisik mereka kecil jika dibandingkan dengan lawannya, mengisyaratkan hidup prihatin dan tekun bertapa. Hal ini berbeda dengan penampilan wayang kiri yakni keluarga Kaurawa, yang berjumlah 100 orang, yang berpakaian mewah gemerlapan: berperut dan bertubuh besar yang menandakan sifat materilistik, rakus dan mementingkan kehidupan duniawi. Keluarga Kaurawa adalah contoh golongan orang yang sesat. Sorot mata keluarga Pandawa mengarah ke bawah, dan halus dalam berucap menandakan bahwa mereka menjunjung tinggi sopan santun, berbudi pekerti dan jauh dari sikap sombong. Hal ini kontradiksi dengan Kaurawa yang dengan sorot mata lebar, mengarah horizontal ke atas dan berwajah merah; menyimbolkan sikap sombong, menantang dan sulit diatur; wajah merah menandakan sikap emosional, marah dan tidak dapat mengendalikan diri. Selanjutnya posisi telapak tangan para ksatria terbuka dan menelungkup; suatu posisi yang bertentangan dengan para punakawan (rakyat jelata, yang terbuka keatas. Hal ini menyimbolkan bahwa sebagai ksatria berkewajiban untuk memberi kepada rakyat. Pada keluarga Kaurawa, posisi telapak tangannya menggenggam, yang berarti pelit, mengambil, dan suka

menggunakan kekerasan. Pertunjukan wayang sudah sejak abad 8 menjadi media dakwah dan sosialisasi budaya Hindu (Soedarsono, 1984: 2-5).

Keberadaan kebudayaan Hindu Jawa di Bima sudah ada sebelum jaman Majapahit. Wujud relief Hindu-Budhis meskipun tidak monumental seperti di Jawa dan Bali, tetapi wujud dan bentuknya menunjukkan kemahiran yang tidak kalah dibandingkan dengan ukiran di Jawa dan Bali. Keberadaan relief itu percandian ini, yang kecil, sederhana, menunjukkan bahwa Bima hanyalah sebuah kerajaan kecil sebagai suatu vazal kerajaan Jawa pada periode Dharmawangsa.

Dalam sistem kasta Hindu, status sosial raja tergolong pada kasta ksatria. Sebagai ksatria raja berada dibawah kasta Brahmana (pendeta). Kewajiban ksatria adalah menegakkan nilai-nilai agama secara politis, oleh karena itu raja dalam menjalankan pemerinthan, berkewajiban mendengarkan nasehat para brahmana. Kewajiban Brahmana adalah menyampaikan ayat-ayat Tuhan, dalam hal ini seseorang baru dianggap sebagai biksu (brahmana) bila meninggalkan kesenangan duniawi. Bekal hidupnya hanya sebuah tongkat, dua jubah, satu cermin dan tempurung tempat makan. Sifat-sifat materialistik dan kapitalis hanya dimiliki oleh kasta Waisya yang status sosialnya lebih rendah dari ksatria.

Ajaran Hindu tidak mendorong tindakan kesewenang-wenangan, kekerasan dan kekejaman. Agama Hindu percaya dengan reinkarnasi, yakni hidup kembali sesudah mati, sesuai karma (perbuatan yang bersangkutan). Hidup yang benar adalah selaras baik terhadap orang lain maupun lingkungannya. Yudistira saudara sulung Bima adalah ksatria, yang dikasihi para Dewa sehingga jika kereta kenaikannya berjalan, rodanya tidak menyentuh

tanah. Ia jujur dan pengasih Apabila hendak duduk, ia periksa dulu dan jika terdapat semut ia bersihkan dengan meniupnya, jangan sampai duduknya berakibat semut terbunuh. Apabila kehidupan seseorang mempunyai banyak dosa maka pada gilirannya ia akan menjelma kembali sebagai makhluk hidup dengan tingkat yang lebih rendah.

Kisah-kisah dalam pakem-pakem wayang merupakan gambaran kepribadian tidak saja Hindu, tetapi juga orang Jawa. Sebab, wayang merupakan media pendidikan dan hiburan sejak jaman Hindu sampai tahun 1980an, yakni ketika televisi dan media informasi masih merupakan hiburan dari kalangan orang yang berada. Wayangan seperti keluarga Pandawa dalam epos Mahabarata atau Rama dalam epos Ramayana. Dalam Mahabarata dikemukakan 5 keluarga pandawa merupakan tokoh ideal merupakan tokoh ideal. Mereka adalah para ksatria yang terdiri dari lima bersaudara yakni Judistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Judistira adalah raja yang dikenal karena kejujurannya. Bima karena dapat menemukan Tuhannya, Arjuna adalah pahlawan dan patriotis, sedangkan Nakula dan Sadewa adalah saudara kembar yang dikenal sebagai intelektual. Bila nilai-nilai ideal mereka digabungkan maka orang yang ideal adalah jujur, berketuhanan, pembela masyarakatnya dan cendekiawan.

Bima berkembang pesat pada masa kekuasaan Ma Nggampo Jawa anak Batara Mitra, yang kawin dengan bangsawan Jawa. Raja Ma Nggampo Jawa (yang artinya menghimpun Jawa), juga "Raja Jawa". Kebudayaan Jawa masuk ke Bima dengan mengundang seorang Ajar Panuli mengajarkan tata pemerintahan, bertani, dan membuat candi. Rakyat Bima mengenal pembuatan batu bata dan saluran irigasi untuk tananam padi. Raja selanjutnya menja-

min ketertiban dan keamanan dengan melawan perampok dan bajak laut (Salahuddin, 1992/1993:60). Dengan melihat gejala masuknya kebudayaan Jawa itu menurut Gerhard dan Jeans Lenski maka Bima telah berkembang menjadi negara agraris.

Negara agraris ditandai dengan berkembangnya komunitas suku menjadi masyarakat yang heterogen. Sistem pengairan dalam pertanian berakibat terjadinya revolusi agraria. Kombinasi teknologi baru meningkatkan hasil pertanian dan peningkatan jumlah penduduk. Pada skala kecil irigasi dilakukan secara informal, tetapi dalam skala luas irigasi disentralisasi oleh penguasa. Apabila sebelumnya hanya dapat panen satu kali tiap tahun, kini minimal dua kali. Artinya terdapat surplus bahan makan. Resiko kelaparan berkurang, sebaliknya daya dukung bahan makanan menjadi berlipat. Kemampuan masyarakat untuk menjamin bahan makan pada kelompok non agraris juga meningkat. Hal ini memungkinkan terjadinya spesialisasi dalam kehidupan.

Raja berpeluang untuk mengangkat pegawai kerajaan. Namun hal ini memerlukan sistem manajemen yang kompleks, berupa suatu birokrasi yang profesional untuk memimpin organisasi pemerintahan. Kerajaan sebagai suatu bentuk negara agraris bercirikan adanya organisasi politik berbasis teritorial, tidak hanya sekedar organisasi berdasarkan hubungan pertalian darah (*kinship*). Sebuah manajemen yang efektif pada masa itu adalah yang tersentralisasi di tangan raja. Mohammad Ali berpendapat bahwa pemerintahan Jawa berat sebelah hanya menguntungkan raja, sebaliknya merugikan rakyat (Ismail, 2004: 39). Namun suatu kerajaan hanya dapat terjamin keberadaannya jika berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain jika negara selalu merugikan rakyat pasti tidak

memiliki ketahanan dalam mempertahankan kedaulatannya. Raja memegang falsafah tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan rakyat.

Perkembangan ini dimungkinkan oleh penemuan tulisan, untuk menyimpan dan mengembangkan tradisi; kalender, tembaga untuk senjata dan alat pertanian, bahkan roda untuk menopang transportasi. Penggunaan tulisan itu berupa perintah Ma Nggampo Jawa untuk menulis Bo Sangaji. Kemajuan yang pesat ditandai dengan digunakannya roda untuk transportasi, tembaga untuk alat pertanian dan peralatan perang dan tulisan, kalender yang digunakan untuk kepentingan pertanian, pelayaran, serta bukan sesuatu yang tidak mungkin pada masa itu telah digunakan uang untuk transaksi perdagangan.

Ketidaksamaan berupa adanya kelompok kecil elit, mungkin hanya penguasa tunggal yang mengontrol sumber-sumber penghasilan kerajaan yang penting dan mengontrol kekuasaan politik. Urusan administrasi ekonomi ditangani oleh pejabat birokrasi, yang pada pucuk pimpinan tertinggi adalah *syah bandar* yang ditempatkan sebagai pengelola pelabuhan Bima yang memungut pajak/cukai atas kapal-kapal dan barang-barang yang melalui pelabuhan. Dalam bidang politik nampak jelas bahwa raja dan perdana menteri adalah jabatan yang diperoleh karena warisan.

Pembentukan negara diikuti dengan proses pemisahan dan ketidaksamaan kelas sosial. Pada lapisan pertama adalah raja, keluarganya dan para pangeran, serta sejumlah pembesar kerajaan yang dapat dibagi menjadi Ruma dan Rato, pada lapisan kedua terdiri dari kepala rendahan, para ulama, dan penduduk kampung, dan pada lapisan terbawah adalah orang-orang yang tergadai karena hutang dan budak (Harris,

Zuhdi, & Wulandari, 1997: 19). Kondisi ini sama dengan di Sulawesi Selatan bahwa status individu ditentukan karena kelahirannya.

Meskipun demikian bukan berarti sebagai monarkhi yang absolut, seperti yang terdapat di Mesir Purba. Raja tunduk pada undang-undang atau adat-istiadat sesuai dengan yang ditafsirkan pendeta. Dalam pakem wayang Petruk menjadi Raja (*Petruk dadi Ratu*), mengingatkan bahwa raja berkewajiban menjaga keselarasan hubungan dengan rakyatnya. Dunia ksatria tidak dapat dipisahkan dari rakyatnya, yang dalam pakem wayang disimbolkan dengan punakawan (yakni Semar, Gareng, Petruk dan Bagong). Ksatria berkewajiban menghormati Semar, yang merupakan simbol orang tua dan cendekiawan. Dalam kehidupan sehari-hari ditonjokan perlunya ksatria menjaga keselarasan dan hubungan dengan para punakawannya. Apabila ksatria hanya mementingkan dirinya sendiri, maka hal ini merupakan pertanda goro-goro yang akan dilalaikan memuncak dengan pemberontakan rakyat. Petruk, sebagai figur petani, memakai kalung yang lzim digunakan sapi dan bersenjatakan cangkul menjadi raja. Ksatria sekali-kali tidak dibenarkan mengabaikan rakyatnya. Sebab rakyat adalah penjelmaan dewa. Semar tidak lain adalah titisan Sang Hyang Ismaya (Sang Hyang Winaya).

Namun sehubungan dengan masyarakat berkembang menjadi kompleks maka terjadi ketidaksamaan sosial yang diinstitusikan pada hirarkhi penguasa, pendeta, pimpinan perang, juru tulis, pengrajin, petani, dan kasta budak. Petani yang merupakan penduduk terbesar negara agraris bekerja bukan untuk dirinya (beda dengan masyarakat holtikultural). Para petani hanya sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol sumber-sumber produksi

makanan seperti tanah, air dan modal atau distribusi hasil produksinya (Bassis, 1991: 143). Ketidaksamaan sosial dalam konsepsi Hindu diperlukan sebagai bagian dari kehendak para dewa untuk menciptakan efisiensi dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Sistem sosial ini terus berlangsung pada Maharaja Batara, Maharaja Indra Bima, Batara Sang Luka, Batara Sang Bima, Maharaja Indra Tarati.

Penaklukan Bima (Senopati Nala) dilakukan secara militer, selanjutnya dipersatukan dengan musyawarah (Sang Bima) dan diperadabkan lewat jalan perkawinan (Ma Nggampo Jawa). Ekspansi bertujuan menciptakan peradaban berdasar nilai-nilai Hindu-Budhis. Suatu kebijakan untuk menciptakan semacam kebijakan Pax Pasifikasi, bukan sebagai upaya menegakkan suatu imperium kapitalistik. Ekspansi bertujuan merealisasikan pandangan hidup seperti dikemukakan Niels Mulder (1973), untuk mewujudkan ketenteraman yang menjamin perkembangan hubungan keselarasan dan keseimbangan, dengan orang lain, dengan menyingkirkan para pengganggu keamanan dan ketertiban. Cita-cita komunitas Jawa adalah terciptanya tatatertib dalam masyarakat yang selaras. Keselarasan masyarakat menjamin kehidupan yang ideal bagi individu. Tugas moral individu adalah menjaga keselarasan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban sosial. Orang Jawa sadar bahwa mereka harus tolong menolong (Mulder, 1973: 44).

Kota Bima sebagai tempat kedudukan raja dibangun sebagai pusat pemerintahan yang formal dan religius. Hal ini juga disebabkan raja menurut falsafah Hindu raja adalah titisan dewa. Konsekwensinya seperti yang diajarkan pada *asta brata*, bahwa raja harus berkewajiban mengikuti sifat-sifat dewa. Sebagai dewa bumi (Brahma) raja harus

mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan seluruh rakyatnya hidup. Sebagai dewa Bayu (angin) bercirikan bahwa kehadirannya mendatangkan kesejukan; sebagai dewa Baruna (air) yang menggenangi dataran rendah, yang konsekwesinya adalah mengayomi orang kecil dan kehadirannya menciptakan kehidupan seluruh makhluk baik tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia, Ia juga berwatak sebagai dewa Surya (matahari), yang kehadirannya merubah gelap gulita menjadikan terang, yang mendorong seluruh aktivitas kehidupan. Namun ia juga berkewajiban sebagai dewa Rudra, yang tidak tidur, siang dan malam memburu para penjahat. Demikian akhirnya Bima berkembang menjadi suatu imperium menjelang kedatangan Islam pada abad 16. Imperium dalam arti berekspansi mendominasi wilayah di luar etnis Bima.

HUBUNGAN DENGAN SULAWESI SELATAN DAN ISLAMISASI

Kitab Bo Sangaji menggambarkan silsilah raja-raja Bima dipertalikan dengan raja-raja Luwu dan Sawerigading, yang merupakan leluhur raja-raja di Sulawesi Selatan. Namun yang jelas ini merupakan fakta budaya yang menunjukkan adanya perubahan orientasi politik dalam upaya memperoleh otoritas kekuasaan tidak hanya dari Jawa, tetapi juga ke Sulawesi Selatan. Dapat dipastikan bahwa kisah ini disusun ketika Sulawesi Selatan sedang tumbuh sebagai kekuatan politik baru yang mampu mengimbangi kekuasaan Jawa yang terus-menerus merosot. Mitologi I Lagaligo, yang merupakan kepercayaan tradisional Bugis, telah berkembang di Luwu pada abad 15. Dalam mitologi I Lagaligo itu ada nama Sawerigading, tetapi tidak ada Maharaja Indra Ratu

(Kern, 1986).

Perubahan orientasi politik terjadi pada abad 15 mungkin lebih awal pada suatu masa ketika terjadi krisis pangan, akibat kemarau panjang. Krisis berkepanjangan diperparah dengan munculnya bajaklaut yang merajalela. Ketidakamanan di laut terjadi karena jatuhnya kerajaan Majapahit. Pada periode ini muncul kekuatan di Nusantara bagian Timur, berupa munculnya kerajaan-kerajaan Luwu, Gowa, Polombangkeng dan lain-lain di Sulawesi Selatan. Krisis keagamaan terjadi. Pengaruh kebudayaan Sulawesi Selatan mulai masuk ke Bima.

Pada masa itu Maharaja Indera Seri menamakan anaknya dengan nama Ma Waa Paju Longge. Suatu nama yang menunjukkan kemiripan dengan nama-nama di Sulawesi Selatan. Raja Ma Waa Paju Longge selanjutnya mengirimkan dua adiknya ke negeri To Manurung di Sulawesi Selatan. Sekembali kedua adiknya dari Sulawesi Selatan raja menyerahkan jabatannya kepada Ma Waa Bilmana. Akan tetapi selanjutnya kedua adik raja bersumpah untuk mempertukarkan jabatan mereka. Ruma Tureli Nggampo (Perdana Menteri) dijabat Manggampo Donggo dan Ma Waa Bilmana sebagai raja. Sumpah berupa keturunan Manggampo Donggo menjadi bicara dan keturunan Ma Waa Bilmana sebagai raja. Pada periode ini raja-raja Bima, mengakui sebagai bagian dari Sulawesi Selatan dengan mengaku berdarah To manurung. Manggampo Donggo belajar cara-cara mengendalikan pemerintahan dari Gowa, yang kemudian menjadi tata adat 53/70. Ia memperbaharui struktur kenegaraan yang telah ada pada masa Hindu dengan menyesuaikannya dengan struktur kenegaraan Gowa, yakni dengan membentuk dewan Hadat. Dewan Hadat oleh merupakan lembaga eksekutif judikatif, dan legislatif. Sebagai

lembaga eksekutif dewan dipimpin oleh Raja Bicara atau Ruma Bicara yang juga disebut Raja Tureli Nggampo pada jaman Hindu, berperan sebagai perdana menteri yang menjadi juru bicara sultan kepada rakyat. Sebaliknya ia juga merupakan wakil rakyat yang mengontrol dan menjadi dewan penasehat Raja (Harris, Zuhdi, & Wulandari, 1997: 71). Dewan ini di Gowa adalah Bate Salapang, dan ketuanya adalah Tomabicara.

Menurut mitologi tradisional di Sulawesi Selatan, krisis yang berkepanjangan baik dalam bidang ekonomi, politik, bahkan bencana alam, merupakan pertanda akan datangnya To Manurung yakni orang yang turun dari langit (dunia atas). Orang ini adalah utusan dewa Datu Patotoqe yang berjanji akan menurunkan keturunannya untuk menyelamatkan dunia, yang merupakan keturunan mereka.

Krisis keagamaan (Hindu) terkait langsung dengan kepercayaan bahwa raja adalah titisan dewa. Hal ini memberi kesan bahwa para dewa telah tidak memberikan berkahnya kepada raja yang berkuasa. Sebaliknya memberi isyarat pada munculnya kekuasaan baru yang sedang tumbuh. To Manurung merupakan suatu bentuk agama yang berkembang di Sulawesi Selatan yang diinspirasi agama Hindu aliran Siwa, dengan mengklaim nama Batara Guru sebagai dewa yang diturunkan ke bumi untuk membangun komunitas manusia. Namun Batara guru sendiri adalah anak Datu Patotoqe yakni Dewa yang mahakuasa yang mengatur kehidupan di dunia atas, yang dapat disetarakan dengan suralaya (tempat tinggal para dewa) dalam kepercayaan Hindu. Dengan mengklaim sebagai keturunan Batara Guru maka raja-raja di Sulawesi Selatan mendapat alasan untuk mengemukakan sesuatu tatanan yang berbeda bahkan bertentangan dengan yang lama.

Kemarau panjang, kiranya bukan gejala lokal, ia terjadi dimana-mana. Untuk mempertahankan hidup seseorang melakukan pekerjaan apa saja di luar sektor pertanian. Kegagalan panen mendorong alternatif perdagangan semakin berkembang. Karena kondisi yang tidak aman pada masa itu maka pelayaran-pelayaran niaga hanya dapat dilakukan dengan rombongan besar, sebagai kafilah, yang dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu perdagangan dapat dilakukan oleh perlindungan raja. Raja pun memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan jasa keamanan, sebaliknya mendapat imbalan berupa pajak. Dalam kondisi demikian berkembang pelayaran-pelayaran niaga yang dilakukan oleh etnis-etnis di Sulawesi Selatan, yang kemudian diramaikan oleh kehadiran etnis Melayu, terutama dari Semenanjung Melaka.

Perkembangan perdagangan antar pulau yang pada masa itu menggunakan angin muson, hanya dipermudah dengan pembentukan organisasi dan jaringan perdagangan, tidak hanya sebatas satu etnis, melainkan antar etnis. Dengan demikian perubahan sosial terjadi dengan munculnya golongan kapitalis. Pada kalangan baru ini terdapat pandangan bahwa keberhasilan hidup seseorang ditandai dengan kekayaan yang dimilikinya. Hal ini karena sejak dari negeri asalnya, agama Islam merupakan produk komunitas pedagang. Solidaritas di kalangan pedagang terbentuk oleh jaringan organisasi bisnis di antara mereka. Solidaritas ini terbentuk tidak hanya sebatas dalam suatu kerajaan, atau etnis, kadang-kadang meluas menjadi antar etnis atau negara. Etos kerja Hindu-Budhis yang kurang mendukung tumbuhnya kapitalis dengan demikian tidak sesuai dengan penghidupan mereka. Hal ini membuka peluang masuknya Islam ke Bima. Peran Biksu yang miskin dan menjadi

beban masyarakat selanjutnya digantikan oleh ulama yang kaya yang dermawan.

Islamisasi pada mulanya dilakukan oleh Demak, kerajaan Maritim Jawa, yang berkembang menggantikan kerajaan Majapahit. E. Utrecht menyatakan bahwa Islam masuk ke Bima pada jaman kerajaan Demak, yakni pada masa pemerintahan Sunan Prapen (putera Sunan Giri) menguasai Lombok dan Sumbawa. Namun Islamisasi terhenti ketika Sultan Trenggono gugur pada 1546, dan di Demak terjadi perang perebutan tahta kerajaan (Utrecht, 1962: 92).

Kitab *Bo Sangaji* mengisahkan bahwa pada 1618 datang para saudagar dari Sulawesi Selatan yakni Daeng Mangali, Bugis Sape, bersama saudagar lainnya dari Luwu, Tallo dan Bone menghadap pembesar Bima mengajak raja Bima masuk Islam (Ismail, 2004). Ajakan para saudagar itu diterima Rumatama Ma Bata Wadu yang kemudian menjadi Sultan Abdul Kahir, La Mabila diganti nama Jalaluddin dan Rumatama Bumi Jara mengganti namanya menjadi Awaluddin. Masuknya para pejabat tinggi kerajaan Bima mendapat reaksi pembesar lainnya sehingga Salasi melakukan pemberontakan. Perlawanan Salasi berhasil menyingkirkan lawannya.

Perkembangan ini dijadikan alasan oleh Raja Gowa, Sultan Alauddin Awalul Islam, pada 1605 melakukan ekspedisi ke Bima, namun dikalahkan. Ekspedisi berikutnya pada 1618 juga dikalahkan. Salasi berdasarkan perjanjian Ncake mendapat bantuan VOC. Akhirnya Abdul Kahir dan para pengikutnya yang telah Muslim melarikan diri ke Gowa. Sultan Abdul Kahir selanjutnya belajar agama kepada Dato ri Bandang, keturunan bangsawan Melayu dari Pagaruyung, yang juga dikenal dengan Khatib Tunggal, yang juga men-

gislamkan Gowa, Wajo dan Gantarang, Bulukumba, ketiganya di Sulawesi Selatan; dan Kutai di Kalimantan Timur (Chamber-Lir & Salahudin, 1999). Dato ri Bandang pernah belajar Islam di Giri (Jawa Timur) (Azra, 1989: 18). Sedangkan Jalaluddin belajar kemiliteran kepada Karaeng Bontomaranu. Pada 1626 Gowa sekali lagi menyerbu Bima dan berhasil menghancurkan kekuatan Salasi, yang kemudian melarikan diri ke Dompu. Sultan Abdul Kahir adalah putera raja Manatau Asi Sawo, raja Hindu terakhir kerajaan Bima. Ia lahir tahun 1601 dan diangkat sultan pertama pada 1633 (Ismail, 1988).

Dato ri Bandang selanjutnya mengirimkan anaknya untuk mengajarkan agama Islam kepada rakyat Bima. Sultan Bima kedua (Anak Sultan Abdul Kahir) memberi hak istimewa kepada orang-orang Melayu sebagai guru agama, yang mengajar dengan bahasa Melayu. Selain itu bangsa Melayu juga menjadi pahlawan karena berkali-kali melawan perompak dan musuh-musuh Bima di pesisir dan di tengah lautan, sehingga puluhan orang Melayu gugur; maka Sultan memberi sebidang tanah kepada orang Melayu, dan jika kawin dengan orang Manggarai, yang pada masa itu dianggap sebagai budak, anaknya dimasukkan sebagai golongan peranakan. Tanah mereka yang kemudian menjadi kampung Melayu, tidak boleh dipindahkan atau diambil kembali kecuali atas kemauan orang Melayu sendiri. Sultan juga memberikan tanah di pedalaman untuk dijadikan sawah, tetapi ditolak karena orang Melayu bukan petani, melainkan pedagang (Ismail, 2004: 16). Jabatan Penghulu dan Imam diserahkan kepada orang-orang Melayu, yang bertugas menangani perkara yang terkait dengan agama. Sultan Bima berjanji untuk selamanya menghormati bangsa Melayu.

Pergeseran pandangan tentang

raja terjadi. Gelar Sangaji digantikan Sultan. Pada masa Hindu, Sangaji adalah titisan dewa, pada masa Islam Sultan adalah wakil Tuhan di dunia atau *zil fi al-'alam* (bayangan Tuhan di atas bumi). Sultan merupakan wujud negara itu sendiri, yang berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi negara, yang berwenang sebagai penguasa perang, dan menentukan hubungan dengan luar negeri. Ia juga memegang amanat hadat yang mewakili seluruh rakyat.

Dari perpesktif sosial-politik, raja menempati puncak hirarkhi kekuasaan. Dalam menjalankan pemerintahan ia dibantu Dewan Hadat (beranggota 24 orang) dan pejabat tinggi kerajaan dengan gelar Toreli, Jeneli dan bumi. Raja Sultan dipilih oleh Dewan Kerajaan berdasarkan garis laki-laki, meski tidak selalu yang tertua (Harris, Zuhdi, & Wulandari, 1997). Dewan Hadat (dewan kerajaan) setelah Islam menjadi Raja Bicara Wazir al Muazam. Pejabat Wazir al Muazam yang menangani urusan kerohanian adalah keluarga dekat Sultan dan jabatan ini diwariskan secara turun-temurun. Tetapi raja Hindu dan Islam sama-sama diperoleh karena kelahiran. Demikian juga jabatan perdana menteri adalah jabatan yang diperoleh karena warisan.

Raja bicara dalam kondisi tertentu dapat memerintah kerajaan. Raja memerintah majelis adat yang terdiri dari puluhan pegawai tinggi sebagai menteri, mereka terdiri dari enam orang Tureli; para gubernur yakni enam orang Jeneli, para penanggungjawab atas protokol dan keamanan yakni Bumi Luma, dan lain-lain; dan para wakil golongan dalam masyarakat yakni Bumi Anangguru. Majelis Hadat terdiri dari tiga badan yakni Sara-sara, Sara Tua, dan Sara Hukum, yang masing-masing secara berurutan memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif dan agama.

Organisasi pemerintahan ter-

konsentrasi di istana sehingga dibentuk struktur organisasi pelayanan yang kompleks kepada Sultan. Di dalam istana segala urusan protokoler dipimpin dua orang pejabat yang disebut Rato Parenta dan wakilnya Ratu Ncandi. Pelayanan umum dilakukan oleh Bumi Sari Tunggu dan Bumi Ndora. Pejabat yang berhubungan dengan kerumahtanggaan yakni Bumi Preka (membuat pakaian), Bumi Daka-tau (mempersiapkan makanan dan jamu tamu) dan Bumi Roka (membersihkan senjata sultan).

Ketidaksamaan sosial pada struktur politik sebelum Islam tetap eksis, tidak hanya antara elit penguasa dan rakyat, tetapi juga pada wewenang keagamaan. Apabila sebelumnya bidang kerohanian menjadi hak dan wewenang para brahmana kemudian beralih kepada orang Melayu. Dalam bidang ini selanjutnya berkembang hierarki vertikal sejak dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terbawah. Pada tingkat tertinggi adalah khalif, yang menangani upacara keagamaan di istana, kemudian para imam, para khatib, lebe, bilal, dan robo pada tingkat desa. Mereka termasuk kelompok *dari ngaji* yang berada dibawah pengawasan khalif yang bergelar Anguru angaji (kepala kerohanian). Pada kurun waktu tertentu khalif tidak ada, pekerjaannya dijalankan oleh Raja Bicara atau Sultan. Tugas mereka memelihara ketaatan pada ajaran beragama, memelihara mesjid, urusan perceraian, perkawinan, perzinahan dan warisan. Bumi Luma duduk sebagai anggota lebaga Syarak karena termasuk di dalamnya masalah pidana kriminal.

Namun spesialisasi birokrasi belum terjadi pada tingkat desa, hanya ada kepala desa yang mengerjakan seluruh pekerjaan. Kepala desa adalah eksekutif dan berwenang atas pengadilan di daerahnya. Di desa pengadilan atas tindak kejahatan menjadi

wewenang kepala desa atau galarang. Hukuman berat berupa hukuman mati diserahkan kepada Sultan dengan mempertimbangkan nesehat dewan Hadat.

Raja sebagai perwujudan negara mendominasi pemilikan ekonomi. Kondisi ini kurang lebih sama dengan yang terjadi pada negara agraris, pada periode Hindu. Raja mengontrol sumber-sumber penghasilan kerajaan yang penting. Misalnya Raja memperoleh penghasilan 3 persen dari jumlah pemasukan dan pengeluaran negara. Jadi kira-kira 4000 real /tahun, selain itu mendapat penghasilan dari sarang burung berjumlah 3 pikul, yang harganya sama dengan 4.500 real. Ia juga memperoleh penghasilan dari ternak kuda di lambu, Kangga Pai, Poja, Wera, Sangeang, dan Sai yang harganya senilai f. 1000,-tiap tahunnya; Ia juga mendapat penghasilan dari tanah adat yang jumlahnya 100.000 ikat padi atau 1250 pikul beras, Raja juga menerima penyerahan hasil pertanian dalam bentuk *innatura*, dan lain-lain. Setiap pembangunan rumah baru dikenai pajak yang diberikan kepada raja. Penghasilan raja juga berasal dari negeri taklukan yakni dari Manggarai yang setiap tiga tahun diserahkan berupa kacang hijau, katun, selain itu Manggarai juga wajib menyerahkan budak yang harganya f.500,- atau uang denda hukuman yang harganya minimal 80 real (Lawang, 2005: 75-79).

Selain raja, kelompok elit penguasa atau pejabat tinggi kerajaan memperoleh penghasilan dari hasil tanah adat dan biaya pengadilan yang jumlahnya 10 persen. (selain itu masih ada pengasilan lainnya). Para Tureli dan Jeneli mendapat penghasilan dari tanah adat berupa hasil pertanian yang diserahkan oleh petani dalam bentuk *innatura*, mendapat 1 real pajak rumah dan bangunan dan juga penghasilan

lainnya. Penghasilan para kepala distrik dan kepala kampung diperoleh dari hasil tanah hadat, dan dari semua uang denda di daerahnya, selain itu juga meliputi 1/4 dari jumlah pajak rumah dan lain-lain di wilayahnya (Harris, Zuhdi, Wulandari, 1997: 78).

Urusan administrasi ekonomi pelabuhan ditangani oleh pejabat birokrasi, yang pada pucuk pimpinan tertinggi adalah syah bandar yang ditempatkan sebagai pengelola pelabuhan Bima yang memungut pajak/cukai atas kapal-kapal dan barang-barang yang melalui pelabuhan.

Masyarakat secara vertikal terdiri dari bangsawan (Ruma dan Rato), orang biasa (orang merdeka, orang baik-baik) dan budak. Sistem pelapisan demikian sama dengan di Sulawesi Selatan yakni yang terdiri dari Anakaraeng (bangsawan), To Maradeka (orang Bebas) dan Ata (budak). Elit penguasa atau birokrasi merupakan golongan bangsawan; orang biasa adalah bukan budak, dan bukan birokrat atau penguasa, termasuk dalam golongan ini adalah pedagang. Golongan budak adalah orang yang bekerja karena diperintah orang lain. Budak banyak dipekerjakan sebagai kuli di pelabuhan, menggarap tanah pertanian, dan sebagai pembantu rumah tangga.

Hirarkhi hubungan antar negara adalah hubungan antara tuan (puang) dan budak (ata). Kerajaan bawahan yang berperang melawan kerajaan atasannya dan kalah akan kehilangan statusnya dan terperosok menjadi budak. Meskipun demikian negara budak pada masa itu tidak berarti kehilangan kekuasaannya. Negara atasan tetap memberi identitas dan harkatnya tradisionalnya dengan tetap mempertahankan keberadaan penguasa, adat dan bicara mereka (Andaya, 2004: 137).

NILAI-NILAI BUDAYA DAN HUBUNGAN GOWA-BIMA

Apabila tujuan hidup Budhis adalah bersatu dengan Tuhannya, sehingga bersikap menerima segala peristiwa yang terjadi sebagai ujian atas ketakwaannya. Dengan kata lain terdapat keterbukaan untuk menempatkan kepentingan individu untuk keharmonisan dan kepentingan masyarakat (Mulder, 1973: 14). Akan tetapi bagi etnis-etnis Sulawesi Selatan, tujuan hidup adalah untuk mencapai kehormatan atau martabat, seperti yang dikutip Mattulada dari sumber tradisional lontara bahwa: "Hanya untuk siri itulah kita tinggal di dunia" Siri merupakan identitas sosial mereka. Mati untuk menegakkan martabat diri merupakan hal yang terpuji dan terhormat. Orang yang tidak memiliki kehormatan merupakan *mate siri* (orang yang telah kehilangan martabat dirinya) dipandang sebagai bangkai hidup (Harris, Zuhdi, Wulandari, 1997: 10).

Untuk mempertahankan kehormatan maka orang Sulawesi Selatan menggunakan tiga ujung, yakni ujung lidah (berbicara dan berdiplomasi), ujung keris (dengan kekerasan, yang bila perlu dengan pembunuhan) dan yang terakhir dengan ujung kemaluan, yakni menjalin silaturahmi berupa hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan dengan demikian merupakan bagian dari menegakkan siri. Bagi orang Makassar yang kehilangan harga diri ia berkewajiban untuk *mate siri* (mati membela martabatnya), ia akan melakukan *jallo* (amuk) untuk *napaentengi siri'na* atau menegakkan kembali martabat dirinya. Kalau ia mati dalam *jallo*, ia dipuji dengan *worowane to engka siri'na* (yang jantan yang ada martabat dirinya) (Mattulada, 1990: 280). Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai ucapan *ewako* (bahasa Bugis), atau *re-*

wako (dalam bahasa Makassar) yang artinya bangkit/mengamuk untuk memperoleh kehormatan. Konsepsi budaya Makassar (juga Bugis) memiliki pandangan yang berlawanan dengan Jawa-Budhis. Apabila Jawa cenderung memandang kehirmonisan hubungan antar individu dan masyarakat sebagai yang utama, sehingga mengabaikan individu (diri sendiri) maka Makassar memandang diri sendiri lebih utama dari lingkungan dan masyarakatnya.

Kepentingan rakyat merupakan fokus pandangan kepemimpinan Gowa. Hal ini dapat dimengerti pada ajaran: "*Luka taro arung, telluka taro adek, Luka taro adek, telluka taro anang, Luka taro anang, telluka taro anang, Luka taro anang, telluka taro maega*". Artinya adalah: batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat; batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum; batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Kewajiban seorang raja adalah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya (Mattulada, 1985: 381).

Hubungan antara Gowa dan Bima sebagai layaknya kakak beradik. Hubungan Gowa bukan semata-mata lewat penaklukan, Gowa mendukung Sultan Abdul Kahir yang tersingkirkan dari tahtanya oleh Sangaji Salasi. Oleh karenanya dalam Perang Makassar Bima memihak Gowa. Namun akhirnya Gowa dikalahkan melawan VOC yang bersekutu dengan Bone. Gowa menandatangani Perjanjian Bungaya 13-14 November 1667, Gowa melepaskan kekuasaannya atas Bima dan menyerahkannya Sultan Bima kepada Kompeni. dan pelayaran orang Makassar dibatasi dan permintaan mereka untuk ijin lewat (Andaya, 2004: 124). Speelman menuntut Gowa menyerahkan Sultan Bima dan pengikutnya, yang dengan berat hati dipenuhi Sultan Hasanuddin pada 17 November 1667. Kegelisahan itu akhirnya diwujudkan dengan memberi

peluang Sultan Bima untuk melarikan diri, pada keesokan harinya.

Ketika diambang kekalahan hubungan Bima dan Gowa kiranya dapat disejajarkan dengan kerajaan Barru, yang menjadi taklukan Gowa. Raja Baru menyatakan kepada saudara tuanya; *"kami bagai burung yang hinggap di tangkai pohon. Ketika pohon itu tumbang kami akan terbang mencari pohon besar di mana kami dapat bermukim"* (Andaya, 2004: 125). Pernyataan dijawab Raja Gowa; *"pulanglah dan cari kehidupanmu sendiri karena Goa sedang tertekan dan tidak dapat lagi memberi sayap di mana kau dapat berteduh"* (L-:37). Tanggungjawab saudara tua atau ibu / tuan adalah melebarkan sayap perlindungan bagi saudara muda atau anak/budak. Namun ketika perlindungan tidak dapat lagi diberikan maka akan lebih ringan dan dijelaskan hanya kata-kata nasehat." Tidak ada anak yang boleh menipu ibunya dan Bagaimana mungkin seseorang mendoakan hal buruk untuk saudaranya (Andaya, 2004: 140).

Perang Makassar diakhiri di Bima dengan sumpah pada 17 Zulhijah 1220 Hijrah dipimpin Wazir Al Muazam Bima, Abdul Nabi Ibnu Hidir bergelar Tureli Donggo yang dikelilingi seluruh pejabat tinggi kerajaan yakni Tureli, Jeneli, Bumi Lama serta Bumi Rendra bersama dengan Bumi Na'e dan Imam Melayu bersama Penghulu dan Matoa Bugis bersama pengikutnya. Mereka berjanji untuk menjalankan kehendak VOC. Selanjutnya pada 22 Zulkaidah 1203 hijrah Sultan Abdul Hamid, yang diangkat VOC memerintahkan Asi menyalin sumpah itu pada kitab Bo Sangaji persumpahan Sultan Kahir dan bersama gurunya Datuk ri Bandang, Datu ri Tiro, Encik Penghulu Abdurrasul dan Imam Melayu Abdul Mukmin serta seluruh orang Melayu dalam Pesiba Paruga Suba (gedung pertemuan kerajaan)

yang disetujui dan diminta Gubernur Makassar (Gurnador) dan Asisten Residen (Fetor) Bima. Perjanjian disertai dengan sumpah untuk mematuhi dilakukan secara sakral dengan upacara keagamaan yang meminta partisipasi leluhur. Perjanjian seperti ini bukan yang pertama kali. Perjanjian seperti ini juga pernah dilakukan oleh Ma Waa Bilmana dan Manggampo Donggo, ketika bersumpah menukar jabatannya.

Naskah perjanjian selanjutnya disimpan menjadi sebagai jimat pelindung negara dalam bentuk kata-kata yang sakral, karena dibuat dengan hikmat atas nama berapa generasi penguasa. Seorang penguasa biasa pergi ke altar leluhur untuk memohon leluhurnya menyembuhkan penyakit dan dengan cara yang sama ia dapat mencari petunjuk dalam perjanjian tentang tata cara mengatur dan menyelesaikan masalah yang dihadapi negerinya. Pelanggaran atas perjanjian merupakan perkara berat karena melibatkan leluhur mereka, generasi pada jamannya dan setelah itu. Kata-kata dan sumpah leluhur menjadi suatu sanksi moral dan supernatural dan berperan mempertahankan seluruh hubungan antar negara dan menjamin stabilitas dari berbagai masalah yang timbul. Hanya kekuatan politik dan supernatural yang lebih besar yang dapat mengubahnya. Memahami siri adalah memahami diri sendiri dan leluhur atau dengan kata lain mengetahui kedudukan dan tempat di dalam masyarakat. Menaklukan suatu wilayah atau menguasai sejumlah penduduk bukan tujuan akhir dari peperangan. Melainkan berusaha mencari pengakuan sebuah negara akan posisi pantas di dalam hirarkhi antar negara. Dengan demikian perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh hirarkhi komunitas yang bersangkutan yang selalu siap diungkapkan dan dipahami

oleh semua pihak. Oleh karenanya tidak ada alternatif lain dalam tradisi Gowa dan Bima adalah setia pada janji.

SIMPULAN

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa penduduk asli Bima telah ada pada jaman prasejarah, sebelum periode Hindu, namun kemudian dikuasai oleh etnis Jawa yang membangun kekuasaan Hindu-Budhisnya. Pada akhirnya periode Islam terjadi hubungan perkawinan dengan etnis-etnis Gowa. Dari dimensi kebudayaan Ditemukan kebudayaan pra Hindu, Hindu dan Islam. Pada periode Islam pandangan Hindu-Budhisme tetap eksis. karena Hindu-Budhis memiliki kesamaan dengan Islam. Oleh karena itu Bima adalah sebuah etnis yang bercorak multikultur. Berbagai sifat yang dapat ditemui pada etnis Jawa dan Gowa terintegrasikan, sehingga dapat ditemui dalam budaya dan pada kalangan orang-orang Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Inninawa.
- Azra, Azyumardi. 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bassis, Michael S. Richard J. Gelles Ann Levine. 1991. *Sociology An Introduction*. Fourth Edition. New York: Mc Graw Hill.
- Chamber-Loir, Henri dan Siti Maryam R. Salahuddin. 1999. *BO' Sangaji Kai, Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Ecole francaise d'Extreme-Orient Yayasan Obor Indonesia.
- Gandhi, Leeila. 2006. *Teori Post Kolonial. Upaya Meruntukan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam.
- Harris, T., Susanto Zuhdi dan Triyana Wulandari. 1997. *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima*. Jakarta; Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Kebudayaan.
- Ismail, M. Hilir. 2004. *Peran Kesultnan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram: Yayasan Adikarya IKAPI berkerjasama dengan The Ford Foundation.
- Kern, R.A.. 1986 *I Lagaligo*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Djambatan
- Lawang, Robert. 2005. *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Majalah Basis* edisi Februari 2007.
- Mattulada. 1985. *Latoa, Suatu Lukisan Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulder, Niels. 1973. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salahuddin, H. Siti Maryam R. 1992/1993. *Bandar Bima*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Slametmulyana. 1965. *Puncak Kemegahan Majapahit, Sejarah Kerajaan Majapahit*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Soedarsono. 1984. *Wayang Wong. The State Ritual Dance Drama in The Court of Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Utrech, E.. 1962. *Sejarah hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung: Sumur Bandung.